

**LAMPIRAN I  
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2013**

**Contoh Surat Laporan Kehilangan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI  
Selaku Ketua TIM TPKN**

**KOP SURAT PENGADILAN**

---

Nomor : ..... 20.....  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal :

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI  
Selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara  
di  
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami kami beritahukan, bahwa barang/kendaraan dinas berupa  
....., Jenis/Merk : ....., Tahun Pembuatan ....., Nomor Polisi :  
....., yang digunakan oleh :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah hilang. Atas peristiwa tersebut tindakan yang telah kami lakukan adalah :

1. Melaporkan kepada pihak yang berkepentingan.
2. Melakukan pemeriksaan.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk proses penyelesaian kehilangan barang/kendaraan dinas, bersama ini kami lampirkan bukti – bukti pendukung antara lain :

1. Surat laporan kehilangan barang/kendaraan dinas dari pemegang barang/kendaraan, kepada atasan langsung/Ketua Pengadilan.
2. Surat Penunjukan pemegang barang/kendaraan dinas.
3. Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dari kepolisian.
4. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian.
5. Gambar / Denah Tempat Kejadian Perkara (TKP).
6. Surat Pernyataan Bertanggungjawab dari pemegang barang/kendaraan dinas.
7. Surat Penunjukan/Pembentukan Tim Pemeriksa dari Satker.
8. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tim Pemeriksa dari Satker.
9. Fotocopy STNK dan BPKB Kendaraan Dinas.
10. Surat Taksiran Harga atas barang/kendaraan dinas yang hilang, dari Dinas Pendapatan Daerah – Unit Pelayanan PKB–BBN-KB di Propinsi/Kabupaten/Kecamatan.
11. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,.
12. Surat Pernyataan Keberatan.
13. Surat Kuasa Khusus Pengalihan Hak dari yang bersangkutan, yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,-.
14. Surat Penyerahan Jaminan
15. Surat Kuasa untuk melelang
16. Surat Kuasa Pematongan Gaji/Penghasilan.
17. Fotocopy surat pembayaran kerugian negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 423922 – Pendapatan Pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara, beserta Fotocopy NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) atau Bukti pematongan angsuran melalui SPM yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran (melalui pematongan gaji), bila sudah ada pembayaran angsuran.
18. Daftar Kerugian Negara

Demikian pemberitahuan ini kami buat sebagai bahan pertimbangan untuk proses Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pejabat/Pegawai bersangkutan.  
Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan .....

TANDA TANGAN + STEMPEL

\_\_\_\_\_  
NIP.

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
3. Ketua Pengadilan Tinggi .....

**LAMPIRAN II  
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2013**

**Contoh Surat Pernyataan Bertanggungjawab (SPB)**

**KOP SURAT PENGADILAN**

**SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNGJAWAB**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya selaku penanggungjawab kendaraan dinas Roda 4 (empat) Nomor Polisi : ....., dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

Jenis : .....  
Type : .....  
Merek : .....  
Isi Silinder : .....  
Tahun Pembuatan : .....

Selanjutnya di hadapan Ketua Pengadilan ....., tertanggal ..... menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saya selaku penanggungjawab kendaraan dinas dengan Nomor Polisi : ....., bertanggung jawab penuh atas peristiwa hilangnya kendaraan dinas tersebut pada hari ....., tanggal ....., sekitar pukul ..... di ....., Jln. ...., kelurahan ....., kecamatan ....., kabupaten .....
- Bahwa saya selaku penanggungjawab kendaraan mengakui sepenuhnya kelalaian saya atas peristiwa kehilangan kendaraan dinas tersebut.
- Bahwa saya selanjutnya akan mempertanggungjawabkan kelalaian saya atas terjadinya kerugian negara tersebut diatas.

Demikian Surat Pernyataan Bertanggungjawab ini saya buat dihadapan Ketua Pengadilan ....., dengan sadar dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga.

Diketahui oleh :  
Ketua Pengadilan .....

.....20....  
Yang membuat pernyataan,

TANDA TANGAN DIATAS MATERAI Rp.  
6.000,-

NIP.

NIP.

**LAMPIRAN III  
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2013**

**Contoh Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)**

**KOP SURAT PENGADILAN**

**SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Menerangkan bahwa dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian negara / kekurangan perbendaharaan sebesar Rp. ....,- (.....) atau senilai kendaraan dinas roda 4 (empat) milik negara yang hilang, yang dalam hal ini disebabkan karena kelalaian saya :

1. Jumlah kerugian / kekurangan tersebut telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah uang sebesar Rp. ....,- (.....) ke Kas Negara di ..... pada tanggal .....
2. Jumlah kerugian / kekurangan tersebut akan saya ganti dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, dengan ketentuan sebagai berikut : yaitu mengangsur setiap bulan dari pemotongan langsung terhadap penghasilan tetap saya berupa gaji dan atau remunerasi (Surat Kuasa terlampir) dan dengan jaminan berupa :
  - a. 1 (satu) buah BPKB Nomor : .....
  - b. Nilai : Rp. ....,- (.....).
  - c. Atas nama pemilik : .....
  - d. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dengan spesifikasi :
    1. Merk : .....
    2. Type : .....
    3. Jenis : .....
    4. Tahun Pembuatan : .....
    5. Isi Silinder : .....
    6. Warna : .....
    7. No. Rangka : .....
    8. No. Mesin : .....
3. Saya selanjutnya telah maklum bahwa saya setelah memberi keterangan ini tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun dan menerima bahwa terhadap saya tidak dilakukan proses tuntutan menurut peraturan perbendaharaan yang berlaku. Keterangan diatas tidak menutup kemungkinan :
  - a. bahwa negara dapat membebaskan saya dari pertanggungjawaban dan saya akan menerima kembali apa yang telah dibayar, jika setelah pemberian keterangan ini terdapat hal – hal yang sekiranya diketahui lebih dahulu, akan menyebabkan negara membebaskan saya dari pertanggungjawaban.
  - b. bahwa negara masih dapat menghapuskan kerugian negara/kekurangan perbendaharaan dan saya akan menerima kembali apa yang telah dibayar, apabila setelah keterangan ini diberikan ternyata bahwa kekurangan dimaksud dapat diperhitungkan dengan kelebihan - kelebihan yang terdapat dalam pengurusannya atau kekurangan itu adalah akibat dari pengaruh alam, pencurian, rusak, hilang diluar kesalahan, kelalaian atau kealpaan.
  - c. bahwa dalam pertanggungjawaban, bersama saya dapat diberi pembayaran kembali apa yang telah dibayar oleh saya lebih dari apa yang seharusnya dibebankan kepada saya.
  - d. bahwa saya dapat meminta pembebasan dan atau pembayaran kembali atas dasar ketentuan yang berlaku.

.....20....

Mengetahui/menyetujui :  
Panitera / Sekretaris  
Pengadilan .....

Yang membuat pernyataan,

TANDA TANGAN + STEMPEL

TANDA TANGAN DIATAS  
MATERAI Rp. 6.000,-

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NIP.

NIP.

Saksi – Saksi : 1. ....

2. ....